

# LAPORAN KINERJA INTERIM

## BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN TRIWULAN 1 TAHUN 2026



# **TIM PENYUSUN**

## **Penanggung Jawab**

Dr. Alfi Sophian, S.Si., M.Si

## **Ketua**

Wisastri Virzani, S.E.

## **Wakil**

Yenita, S.Si., Apt.

## **Anggota**

Ika Purwaningsih., S.Si

Lisnawati, A.Md

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja interim Triwulan I tahun 2026 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) dapat diselesaikan dengan baik.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I ini memuat penjelasan mengenai capaian setiap sasaran kegiatan BPKOM sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, termasuk aspek keuangan yang menggambarkan keterkaitan antara penggunaan anggaran negara dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, laporan ini juga menguraikan keberhasilan serta kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target pada setiap indikator kinerja, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja BPKOM.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, dan pengembangan kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan ke arah yang lebih baik.

Jakarta, 24 April 2026  
Kepala Balai Pengujian Khusus Obat  
dan Makanan,



Dr. Alfi Sophian, S.Si., M.Si.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon III dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim. Laporan Kinerja Interim TW I ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPKOM atas kinerjanya kepada Kepala BPOM dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPKOM pada tahun berjalan serta upaya untuk memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya selama tahun 2026.

BPKOM telah menetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), yaitu: (1) Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, (2) Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar, (3) Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang Prima, (4) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal. Dan dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama yakni IKU 1 Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar; IKU 2 Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; IKU 3 Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar; IKU 4 Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan; IKU 5 Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan; IKU 6 Nilai AKIP Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan; IKU 7 Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan; IKU 8 Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, dari 8 (delapan) indikator kinerja BPKOM, terdapat 6 (enam) indikator yang memiliki target capaian pada akhir tahun sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada Triwulan I. Meskipun demikian, berbagai upaya dan langkah strategis telah dilaksanakan sebagai bagian dari proses pencapaian target kinerja tersebut pada akhir tahun.

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang ditargetkan pada Triwulan I, seluruhnya memperoleh capaian kinerja dengan kategori sangat baik (realisasi  $100\% < x \leq 110\%$ ). Sementara itu, terdapat 6 (enam) indikator kinerja lainnya yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium memperoleh capaian sebesar 100,20%. Selain itu, indikator Persentase Sampel Khusus/Kasus yang Ditindaklanjuti sesuai Standar memperoleh capaian sebesar 100,60%. Berdasarkan capaian tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPKOM mencapai 100,40% dengan **kategori Istimewa**.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2026 untuk mencapai sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja serta membiayai kegiatan lainnya BPKOM memperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 pada DIPA sebesar Rp. 14.403.910.000 (empat belas milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Sampai dengan 31 Maret 2026, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 2 kali revisi dari DIPA awal yang disebabkan oleh adanya program *Automatic Adjustment* dari Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sehingga anggaran akhir menjadi Rp. 13.949.814.000 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Realisasi anggaran BPKOM hingga 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp. 884.670.346,- (Delapan ratus juta delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) atau 6,34% dari pagu yang dikelola Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sebesar Rp. 13.949.814.000

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, BPKOM harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis, sumber daya, maupun anggaran. Meski demikian, BPKOM menunjukkan komitmen kuat dan respons strategis dalam mengatasinya.
2. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan penguatan laboratorium, seperti peningkatan kompetensi personel, pemenuhan ruang lingkup pengujian, pengadaan peralatan, dan bahan pereaksi untuk verifikasi metode analisis. Untuk menjawab tantangan ini, BPKOM mengadopsi pendekatan efisiensi dengan mengoptimalkan pelatihan daring dan memanfaatkan reagen yang tersedia, serta memperkuat koordinasi dengan PPPOMN dan Balai POM terdekat untuk mendukung operasional pengujian kasus/kasus khusus.
3. Selain itu, untuk menjaga kualitas layanan publik yang prima, BPKOM menghadapi hambatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana layanan. Strategi yang diterapkan termasuk menunggu optimalisasi anggaran serta mendorong peningkatan kompetensi petugas dan inovasi layanan berbasis digital.

4. Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang optimal, BPKOM mengembangkan Zona Integritas (ZI) dan sistem manajemen risiko sebagai langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel. Keterbatasan anggaran dalam implementasi program ini ditanggulangi melalui pelaksanaan kegiatan secara bertahap dan berbasis daring.
5. Keberhasilan yang telah dicapai, seperti tingginya persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai standar (mencapai 100,60% dari target), merupakan hasil dari sinergi antara manajemen waktu, kompetensi SDM, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal. Seluruh pencapaian ini juga ditopang oleh mekanisme monitoring dan evaluasi berkala, yang menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
6. Ke depan, BPKOM berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi internal, efisiensi anggaran, serta inovasi dalam layanan dan pengawasan demi mewujudkan target kinerja tahunan secara menyeluruh dan berdaya guna.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPKOM Triwulan 1 Tahun 2026, telah dirumuskan langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja BPKOM antara lain: Dalam rangka meningkatkan kinerja BPKOM pada periode selanjutnya, khususnya untuk pencapaian target kinerja Tahun 2026 secara menyeluruh, disampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan kompetensi SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis dan manajerial, baik secara luring maupun daring, guna mendukung peningkatan kualitas hasil pengujian dan layanan.
2. Diperlukan upaya peningkatan sarana dan prasarana laboratorium, termasuk perluasan ruang lingkup pengujian serta pemenuhan standar mutu laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perlu dilakukan pengelolaan anggaran secara lebih efektif dan efisien melalui perencanaan yang matang, prioritas kegiatan, serta peningkatan pengendalian terhadap realisasi anggaran.
4. Pengembangan inovasi layanan berbasis digital serta peningkatan kapasitas petugas layanan perlu terus didorong guna meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.
5. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pembangunan Zona Integritas, serta penerapan manajemen risiko perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala perlu diperkuat guna memastikan seluruh indikator kinerja dapat tercapai sesuai target akhir tahun.

7. Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKOM.

# HIGHLIGHT KINERJA

## 1. Benchmark Peningkatan Kapasitas SDM BPKOM



Kegiatan benchmark BPKOM dilaksanakan pada tanggal 20-21 Januari 2026 di PT. Sinkona Indonesia Lestari, Bandung, sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam pengujian kimia dan biologi obat kuasi. Kegiatan ini diikuti oleh 22 personel, dengan fokus pada penguatan kompetensi teknis serta pemahaman

terhadap praktik terbaik di industri farmasi yang telah menerapkan standar mutu internasional.

Melalui pemaparan, kunjungan fasilitas, dan diskusi teknis, peserta memperoleh wawasan terkait modernisasi laboratorium dan tren pengujian terkini. Kunjungan langsung ke fasilitas produksi dan laboratorium memberikan gambaran nyata penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan standar SNI ISO/IEC 17025:2017. Diskusi teknis yang dilakukan turut memperdalam pemahaman peserta terhadap penggunaan teknologi analisis modern seperti LC-MS/MS dan GC-MS, serta penguatan sistem manajemen mutu berbasis risiko dan digitalisasi laboratorium melalui LIMS.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi strategis dalam meningkatkan kompetensi teknis, memperkuat sistem laboratorium, serta menjadi dasar dalam perumusan langkah tindak lanjut guna mendukung pengembangan laboratorium BPKOM yang modern, efektif, dan berstandar internasional.



## 2. Forum Konsultasi Publik

Pada tanggal 9 Maret 2026, PPPOMN dan 3 UPT di Lingkungan PPPOMN mengadakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan mengusung tema ***“Memperkuat sinergi untuk pelayanan publik yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.”*** Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik PPPOMN dan 3 UPT di Lingkungan PPPOMN

agar senantiasa memberikan layanan yang prima, bermutu, cepat, dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, baik secara luring maupun daring, yang meliputi perwakilan instansi pemerintah, akademisi, dunia usaha, laboratorium, media, serta tokoh masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.



PPPOMN dan 3 UPT di Lingkungan PPPOMN memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium guna mendukung keamanan serta daya saing produk obat dan makanan. Pelayanan yang diberikan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik, serta terus dilakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, penyusunan dan pengembangan standar pelayanan dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik. Selain itu, survei kepuasan masyarakat juga telah dilaksanakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.



Ruang lingkup layanan PPPOMN dan 3 UPT di Lingkungan PPPOMN meliputi penyediaan baku pembanding kimia dan mikrobiologi, uji profisiensi, pelatihan teknis laboratorium, kalibrasi, layanan pengujian, layanan hewan uji, serta *lot release*. Dalam rangkaian kegiatan ini, juga diselenggarakan Forum Baku Pembanding Farmakope Indonesia.

Diharapkan melalui forum ini dapat diperoleh masukan yang konstruktif dan komprehensif sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan PPPOMN dan 3 UPT di Lingkungan PPPOMN secara berkelanjutan

### 3. Jejaring Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan kolaborasi dalam pengujian sampel kasus dan investigasi, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada tanggal 10 Maret 2026 menyelenggarakan Forum Group Discussion dengan tema “Membangun Sinergi Laboratorium Nasional dalam Pembentukan Jejaring Laboratorium Investigasi”, yang diadakan secara daring.



Kegiatan ini diikuti oleh laboratorium eksternal BPOM antara lain: Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido, Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Bea Cukai Kelas 1 Jakarta, Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kriminalistik Satuan Penyidikan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta laboratorium internal BPOM yakni BPKOM, PPPOMN dan Kedeputusan IV

Diskusi bersama antar laboratorium dari berbagai institusi ini gunanya untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam penanganan sampel kasus yang memerlukan dukungan pengujian laboratorium. Penanganan kasus dimaksud dapat meliputi narkotika, obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, serta berbagai emerging issues di masa mendatang. Kegiatan diskusi antar laboratorium ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar institusi dalam mendukung pengujian sampel kasus dan investigasi. Melalui forum ini, para peserta dapat saling berbagi informasi, pengalaman, serta menyamakan persepsi terkait mekanisme penanganan dan pengujian sampel kasus yang memerlukan dukungan laboratorium.

Sinergi yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan ketepatan dalam penanganan kasus, khususnya yang berkaitan dengan narkotika, obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, serta berbagai isu baru (*emerging issues*) yang berpotensi muncul di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi dasar dalam membangun jejaring

kerjasama laboratorium yang lebih kuat, sehingga proses investigasi dan pembuktian ilmiah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, cepat, dan akurat.

# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
<i>HIGHLIGHT</i> KINERJA .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3 Struktur Organisasi .....	5
1.4 Isu Strategis .....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Uraian Singkat Renstra .....	8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	11
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	12
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) .....	13
2.5 Metode Pengukuran.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya .....	59
3.3 Realisasi Anggaran .....	62
BAB IV PENUTUP .....	65
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Rekomendasi .....	65
Lampiran I Perjanjian Kinerja BPKOM Tahun 2026.....	67
Lampiran II Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPKOM Tahun 2026 .....	70
Lampiran III Capaian RHPK BPKOM Triwulan 1 Tahun 2026 .....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kerja Tahunan BPKOM Tahun 2026.....	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja BPKOM Tahun 2026 .....	12
Tabel 2.3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPKOM Tahun 2026 .....	13
Tabel 2.4	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan .....	14
Tabel 2.5	Perhitungan NKO Periodik .....	15
Tabel 2.6	Perhitungan NKO Tahunan.....	16
Tabel 2.7	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP .....	17
Tabel 2.8	Predikat Nilai Kinerja Organisasi.....	18
Tabel 2.9	Kategori Nilai Capaian .....	18
Tabel 2.10	Tingkat Efisiensi Kinerja.....	19
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Triwulan 1 Tahun 2026 .....	21
Tabel 3.2	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Laboratorium BPOM .....	23
Tabel 3.3	Capaian Realisasi Kinerja IKU 1 Persentase Sampel Khusus/Kasus yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar pada Triwulan 1 Tahun 2026 .....	25
Tabel 3.4	Capaian Realisasi Kinerja IKU 1 pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Triwulan 4 Tahun 2025 .....	26
Tabel 3.5	Capaian Realisasi IKU 1 Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026 .....	26
Tabel 3.6	Matriks Rekomendasi Tahun 2026.....	27
Tabel 3.7	Capaian Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPKOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....	28
Tabel 3.8	Capaian Realisasi Kinerja IKU 1 pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Triwulan 4 Tahun 2025 .....	29
Tabel 3.9	Capaian Realisasi IKU 1 Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026 .....	30
Tabel 3.10	Matriks Rekomendasi Tahun 2026.....	30
Tabel 3.11	Capaian Realisasi Kinerja IKU 3 Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar pada Triwulan 1 Tahun 2026 .....	33
Tabel 3.12	Capaian Realisasi Kinerja IKU 3 pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Triwulan 4 Tahun 2025 .....	34

Tabel 3.13 Capaian Realisasi IKU 3 Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Renstra akhir Tahun 2029.....	34
Tabel 3.14 Matriks Rekomendasi Tahun 2026.....	35
Tabel 3.15 Capaian Realisasi Kinerja IKU 4 Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Triwulan 1 Tahun 2026.....	38
Tabel 3.16 Matriks Rekomendasi Tahun 2026.....	38
Tabel 3.17 Capaian Realisasi IKU 4 Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Target Akhir Tahun 2026 .....	39
Tabel 3.18 Matriks Rekomendasi Tahun 2026.....	39
Tabel 3.19 Cara Perhitungan Nilai Pembangunan ZI.....	42
Tabel 3.20 Capaian Realisasi Kinerja IKU 5 Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Triwulan 1 Tahun 2026.....	42
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Triwulan 4 Tahun 2025 .....	43
Tabel 3.22 Capaian Realisasi IKU 5 Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Target Akhir Tahun 2026 .....	43
Tabel 3.23 Matriks Rekomendasi Tahun 2026.....	44
Tabel 3.24 Bobot Penilaian AKIP.....	46
Tabel 3.25 Predikat Nilai AKIP.....	46
Tabel 3.26 Capaian Realisasi Kinerja IKU 6 Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Triwulan 1 Tahun 2026 .....	47
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Triwulan 4 Tahun 2025 .....	47
Tabel 3.28 Capaian Realisasi IKU 6 Triwulan 1 Tahun 2026 dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026 .....	48
Tabel 3.29 Matriks Rekomendasi Tahun 2026.....	48
Tabel 3.30 Konversi kategori penilaian dalam PMK 62/2023 .....	50
Tabel 3.31 Capaian Realisasi IKU 7 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Triwulan 1 Tahun 2026 .....	50
Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Triwulan 4 Tahun 2025 .....	51
Tabel 3.33 Capaian Realisasi IKU 5 Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2026.....	51
Tabel 3.34 Matriks Rekomendasi Tahun 2026.....	52
Tabel 3.35 Kategori Tingkat Maturitas .....	54
Tabel 3.36 Klasifikasi Tingkat Maturitas Manajemen Risiko.....	55
Tabel 3.37 Capaian Realisasi IKU 8 Indeks Manajemen Risiko pada Triwulan 1 Tahun 2026 .....	55

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Triwulan 4 Tahun 2025 .....	56
Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Target Akhir Tahun 2026.....	56
Tabel 3.40 Matriks Rekomendasi Tahun 2026.....	57
Tabel 3.41 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi .....	59
Tabel 3.42 Realisasi Kinerja Indikator dibandingkan Realisasi Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan s/d Bulan Maret Tahun 2026 .....	62
Tabel 3.43 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	63
Tabel 3.44 Tingkat Efisiensi Kinerja.....	63
Tabel 3.45 Efisiensi Anggaran per Indikator Kinerja di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Triwulan 1 Tahun 2026.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	3
Gambar 1.2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	4
Gambar 1.3	Struktur Organisasi BPKOM.....	5
Gambar 2.1	Asta Cita Presiden .....	9
Gambar 2.2	Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	17
Gambar 3.1	Tangkapan Layar Nilai IKPA BPKOM Triwulan 1 Tahun 2026.....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka BPKOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Interim BPKOM Triwulan 1 Tahun 2026 merujuk kepada rencana strategis BPKOM tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2026.

Laporan Kinerja Interim ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKOM selama Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026,

sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja di tahun berikutnya. Dengan penyusunan laporan ini diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam mendukung perlindungan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan.

## 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengujian khusus obat dan Makanan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang dipimpin oleh seorang kepala Balai. Balai Pengujian khusus obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Sesuai dengan peraturan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 358 Tahun 2025 Tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) mempunyai tugas melaksanakan pengujian khusus Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

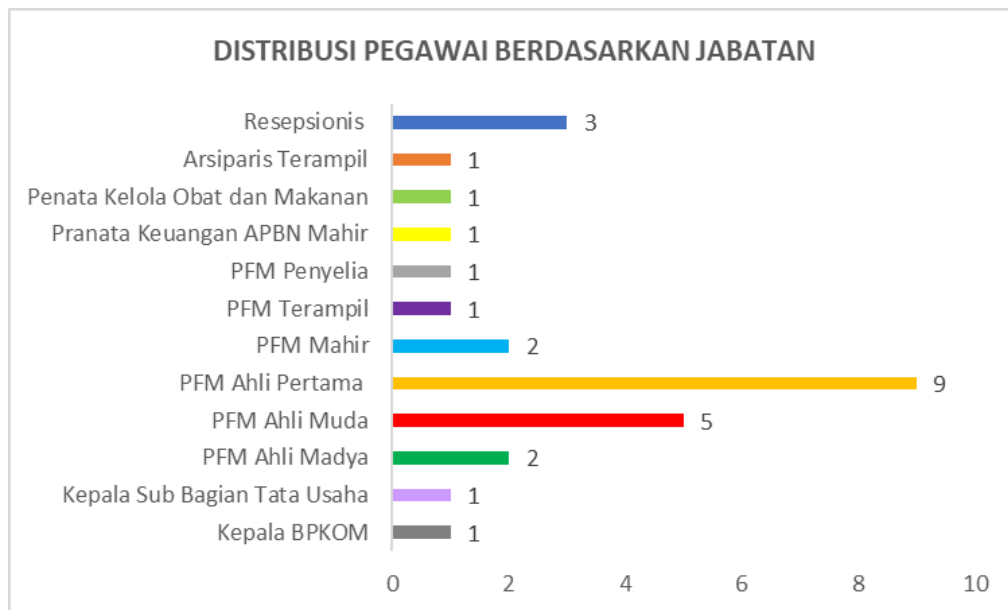
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengujian khusus Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi, molekuler atas sampel investigasi, intelijen, dan/atau penyidikan Obat dan Makanan dalam lingkup nasional
3. Pelaksanaan pengujian rujukan khusus kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler Obat dan Makanan dalam lingkup nasional
4. Pelaksanaan pengujian lingkup nasional dan koordinasi jejaring internasional produk tembakau
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian khusus Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, sebagaimana telah diatur pada tugas Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK UPT pada PPOMN

Pengujian Khusus adalah pengujian Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan, kajian serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan berperan dalam

mendukung pengawasan dan pengendalian mutu obat dan makanan guna melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi standar mutu dan keamanan.

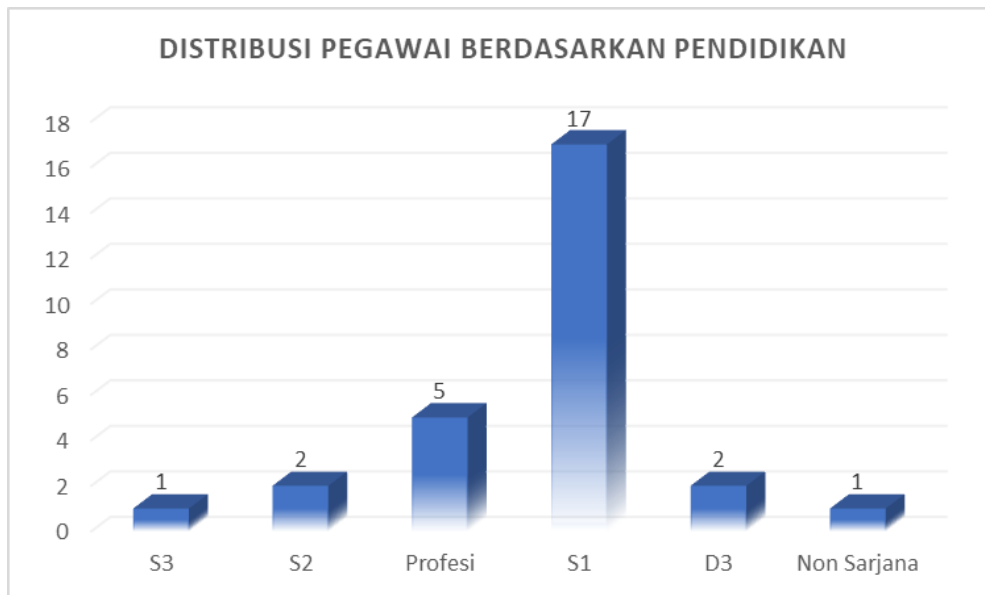
### SUMBER DAYA MANUSIA

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga alih daya. Berdasarkan data pegawai per Maret 2026, terdapat 25 orang ASN dan 3 orang tenaga alih daya. Berikut data sebaran pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan berdasarkan jabatan.



Gambar 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Selain itu pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan berasal dari berbagai tingkat pendidikan untuk melaksanakan fungsi teknis dan administrasi sebagai sebuah satuan kerja mandiri. Berikut adalah profil pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan berdasarkan tingkat pendidikan.



Gambar 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

## KETATALAKSANAAN

Dalam rangka menjamin mutu hasil pengujian, BPKOM menerapkan berbagai sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional sebagai landasan utama untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan keandalan proses laboratorium. Penerapan sistem manajemen mutu tersebut tidak hanya meningkatkan kredibilitas lembaga, tetapi juga menjamin bahwa pengujian khusus obat dan makanan dilaksanakan sesuai dengan standar, sehingga hasil pengujian dapat diterima dan dipercaya oleh pihak internal dan eksternal BPOM.

Terdapat beberapa standar mutu terverifikasi yang telah diterapkan di BPKOM melalui kegiatan audit internal dan eksternal. Melalui audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal BPKOM maupun BPOM, BPKOM menerapkan beberapa standar mutu, diantaranya:

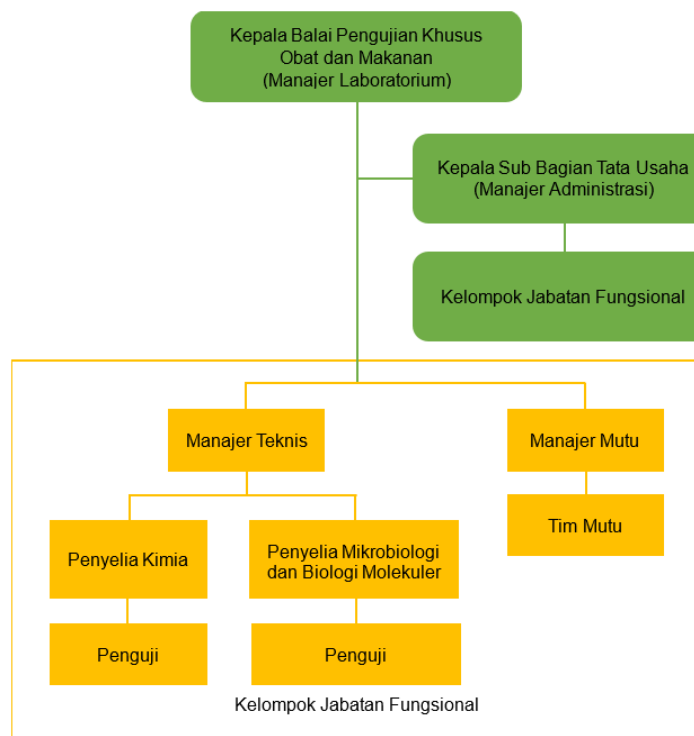
- a. ISO 9001: 2015 sebagai kerangka manajemen mutu yang memastikan bahwa seluruh proses operasional BPKOM berjalan secara efektif dan terdokumentasi dengan baik.
- b. ISO 17025:2017 untuk memastikan bahwa laboratorium BPKOM memiliki kompetensi teknis yang memadai dan menghasilkan hasil uji yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. ISO 37001:2015 yang mendorong terbentuknya sistem pengendalian yang sistematis untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuaian. Hal ini memperkuat budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses kerja BPKOM.

Selain itu, BPKOM juga menerapkan beberapa Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pemanfaatan sejumlah aplikasi dan platform digital yang hingga kini terus dikembangkan. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan

Terpadu (SIPT) BPOM terkait pelaporan hasil pengujian sampel dari internal Unit Kerja pusat, UPT Balai, dan dari eksternal pihak ketiga.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan memiliki struktur organisasi sebagai berikut: Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan membawahi Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi BPKOM

Selain itu, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan serta pelaksanaan direktif penugasan oleh Kepala BPKOM, dibentuk pula Ketua Tim Kerja. Ketentuan mengenai pembentukan dan penetapan tim tersebut tercantum dalam Surat Tugas Nomor PR.02.02.13.01.26.013 Tahun 2026.

### 1.4 ISU STRATEGIS

Kegiatan Strategis Program Pengawasan Obat dan Makanan pada Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.

1. Pengujian sampel kasus/khusus

Pengujian laboratorium berperan signifikan dalam pengambilan keputusan pengawasan. Pengujian *Emerging issue* terkait keamanan pangan perlu diantisipasi oleh BPKOM sebagai otoritas keamanan pangan, antara lain: Kontaminasi Mikroplastik dalam Makanan dan Minuman, Peningkatan Resistensi Antimikroba (AMR), Perubahan Iklim dan Keamanan Pangan dimana terjadi perubahan suhu dan pola cuaca berdampak pada hasil pertanian, distribusi hama, dan kontaminasi pangan oleh mikotoksin, serta adanya inovasi pangan baru (Novel Foods), daging kultivasi, serangga, dan pangan berbasis alga memerlukan regulasi serta evaluasi keamanan yang ketat, cemaran pestisida pada pangan olahan, serta adanya migrasi bahan kimia, misal PFAS pada kemasan kertas multilayer.

Tantangan pengujian khusus sediaan farmasi dan pangan olahan terus berkembang antara lain pengujian fitofarmaka di dalam obat tradisional, pengujian cemaran logam dan bahan dilarang di dalam kosmetik, pengujian gen pengkode toksin dan pengujian DNA rendah, serta pengujian *emerging issue* lainnya. Dalam rangka mengantisipasi dan menangani *emerging issue* ini diperlukan peran penting pengujian laboratorium terutama peran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.

## 2. Pengujian sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sebagai salah satu dari 3 laboratorium Unggulan Badan POM yang melaksanakan pengujian rokok di Badan POM. Diperlukan strategi dalam peningkatan kapabilitas pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik sehingga pengawasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik tersebut sesuai dengan amanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Strategi dalam peningkatan kapabilitas pengujian rokok yaitu;

- Perkuatan dan sinergitas regulasi dalam pengawasan produk tembakau melalui koordinasi KL terkait
- Perkuatan laboratorium pengujian rokok melalui sumber daya yang kompeten, sarana dan prasarana laboratorium pengujian rokok serta jaminan Kesehatan terhadap pengujian produk berisiko
- Implementasi sistem jaminan mutu pengujian rokok di Indonesia
- Perkuatan komitmen pemerintah melalui penyediaan anggaran pemeliharaan alat laboratorium pengujian rokok

- Perkuatan jejaring laboratorium rokok secara global dan peningkatan koordinasi antar laboratorium rokok di Indonesia dalam menghadapi kendala dan tantangan pengujian rokok serta meningkatkan kemitraan kelembagaan

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun langkah strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Renstra BPOM memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan periode 2025-2029. Renstra BPOM perlu dijabarkan ke dalam Rencana Strategis yang lebih teknis dalam mencapai program dan kegiatan prioritas BPOM. Untuk itu BPKOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, serta kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra BPKOM mengacu Renstra BPOM 2025-2029. Sejalan dengan Visi Presiden RI 2025 – 2029 yaitu:

Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, maka Visi BPOM adalah:

#### **VISI BPOM**

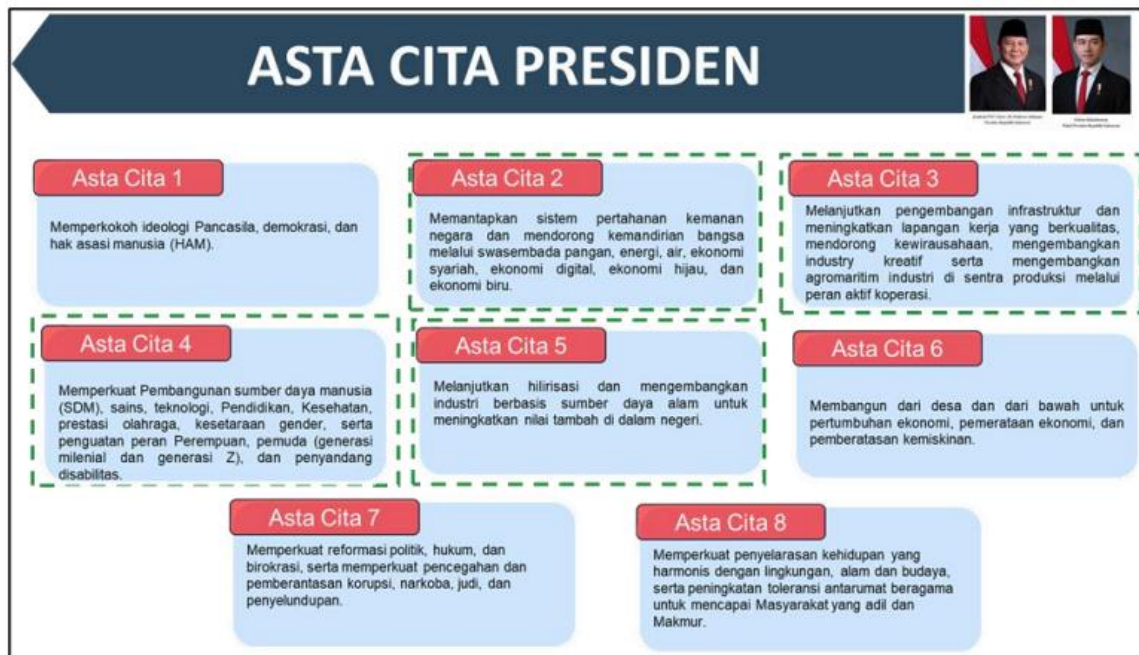
**"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

#### **MISI BPOM**

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategis organisasi. Misi BPOM disusun memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang terkenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Asta Cita Presiden

BPOM utamanya mendukung Asta Cita 4 yaitu, “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas”. Namun demikian BPOM juga mendukung Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2,3,5,6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka implementasi Misi BPOM, BPKOM berperan menunjang Misi:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat

2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

### **TUJUAN BPKOM**

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPKOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPKOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

### **SASARAN KEGIATAN BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN (BPKOM)**

Berikut adalah sasaran kegiatan BPKOM 2025 - 2029 yang sejalan dengan sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 yang mencakup tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan terukur khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pengujian kasus/khusus di Indonesia, yaitu

1. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium: Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama BPKOM terkait dengan fungsi pengujian obat dan makanan, BPKOM mempunyai 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan ini yaitu: (1) Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar, (2) Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar. Dalam mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan ini

dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar.

3. Layanan Publik BPKOM yang Prima: Berkenaan dengan aspek pelayanan publik yang prima yang diberikan oleh BPKOM kepada stakeholder dan penerima layanan, BPKOM mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan ini dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik BPKOM. Indeks ini tentunya menggambarkan kualitas jenis layanan pengujian yang diberikan oleh BPKOM.
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal: Dalam mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan ini, BPKOM memiliki 4 (empat) indikator yaitu Nilai Pembangunan ZI BPKOM, Nilai AKIP BPKOM, Nilai Kinerja Anggaran BPKOM, dan Indeks Manajemen Risiko BPKOM.

## 2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan No HK.02.02.13.01.26.007 Tahun 2026 tentang Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 02 Januari 2026 ditetapkan rencana kerja BPKOM untuk tahun 2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKOM berdasarkan Peta Strategis dan Reviu Renstra meliputi target berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan BPKOM Tahun 2026

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99.4%
		Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83.75%
2	Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Elektronik yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Standar	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	91.5%
3	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4.86
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	77.1
		Nilai AKIP Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	75

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	2.05

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-063.01.2.691156/2026, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan memperoleh alokasi anggaran TA 2026 sebesar Rp 14.403.910.000 (empat belas milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Sampai dengan 31 Maret 2026, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 2 kali revisi dari DIPA awal yang disebabkan oleh adanya program *Automatic Adjustment* dari Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sehingga anggaran akhir menjadi Rp. 13.949.814.000 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Penetapan Kinerja tahun 2026 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dengan Kepala Pusat Pengembangan Pegujian Obat dan Makanan, dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Matriks IKK pada dokumen PK BPKOM Tahun 2026 terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPKOM Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99.4%
		Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83.75%
2	Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Elektronik yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Standar	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	91.5%
3	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4.86

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	77.1
		Nilai AKIP Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	75
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	2.05

## 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2026 yang merupakan Rencana Aksi dari Kontrak Kinerja Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dengan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan, dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPKOM Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	Target				Anggaran (Rp)
				B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya Laboratorium sesuai Kemampuan Laboratorium BPOM Standar	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	1,372,403,000
		Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83.75	82.35	82.69	83.04	83.75	6,793,373,000
2	Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	91.5				91.5	186,789,000
3	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4.86				4.86	91,509,000
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	77.1				77.1	257,743,400
		Nilai AKIP Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	75				75	1,030,973,600
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	5				5	4,138,300,000

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	Target				Anggaran (Rp)
				B03	B06	B09	B12	
		Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	2.05				2.05	78,723,000

## 2.5 METODE PENGUKURAN

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Pengukuran indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:




$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Pengukuran indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam mengukur kriteria pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama, ditetapkan kategori sebagai berikut :

Tabel 2.4 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>110%	
Sangat baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian indikator kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- a. jika capaian kinerja setiap indikator  $>100\%$  maka akan dinormalisasi menjadi  $110\%$ ; dan
- b. jika capaian kinerja setiap indikator  $\leq 110\%$  maka tidak dilakukan normalisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*. NKO di lingkungan BPOM terdiri dari:

#### 1. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Normalisasi dilakukan pada IKSP dengan capaian  $>110\%$  maka dinormalisasi menjadi  $110\%$ . Perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perhitungan NKO Periodik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1						
2						
3						
Total Capaian PK (3)						
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK) (4)						
Predikat NKO (5)						

Keterangan:

- (1) =  $(\text{realisasi}/\text{target}) \times 100\%$
- (2) = IKSP  $>110\%$  dinormalisasi menjadi  $110\%$ .
- (3) = penjumlahan kolom (2)
- (4) = (3) dibagi dengan jumlah IKSP

## 2. NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

### a. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

### b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Tabel 2.6 Perhitungan NKO Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (3)	Nilai Akhir Capaian PK (4) $\{(2) \times (100\% - (3)) \times 100\}$
1								
2								
3								
Total Capaian PK (5)								
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (6)								
Predikat NKO (7)								

Keterangan:

(1) =  $(\text{realisasi}/\text{target}) \times 100\%$

(2) = IKSP > 110% dinormalisasi menjadi 110%.

(3) = (2) dikurangi dengan nilai predikat AKIP

(4) =  $\{(2) \times (100\% - (3)) \times 100\}$

(5) = penjumlahan kolom (4)

(6) = (5) dibagi dengan jumlah IKSP

Tabel 2.7 Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%



Gambar 2.2. Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah






Keterangan:

- Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin (2)
- Koreksi Normalisasi Capaian PK (3), merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana Gambar 2.2 Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.7.
- Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja (4). Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 2) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 3), dikalikan 100

Namun dikarenakan BPKOM baru menjadi satker mandiri pada tahun 2025, maka tahun ini belum dilakukan penilaian AKIP, sehingga dianggap tidak ada koreksi untuk capaian PK.



- Total Capaian Perjanjian Kinerja Tahunan (5), Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 4) pada setiap indikator kinerja
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahunan (6), Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 5) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).
- Hasil NKO (7) dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:


Tabel 2.8 Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% \leq x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Untuk menentukan nilai capaian bila dibandingkan dengan target tahun berjalan disampaikan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.9 Kategori Nilai Capaian

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - <100\%$ ( $70 \leq x < 100$ )	

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Perlu upaya keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $< 70\%$ ( $x < 70\%$ )	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 2.10 Tingkat Efisiensi Kinerja

Tingkat Efisiensi	% Capaian	Keterangan
$< 0$	-	Tidak Efisien
$0 - 0,2$	100%	Efisien
$0,21 - 0,4$	95%	Efisien
$0,41 - 0,6$	92%	Efisien

<b>Tingkat Efisiensi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Keterangan</b>
0,61 – 0,8	90%	Efisien
0,81 – 1,0	88%	Efisien
1,01 – 1,2	86%	Tidak Efisien
1,21 – 1,4	84%	Tidak Efisien
1,41 – 1,6	80%	Tidak Efisien
1,61 – 1,8	78%	Tidak Efisien
> 1,81	75%	Tidak Efisien

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan secara periodik. Analisis akuntabilitas kinerja adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap sejauh mana sebuah organisasi atau individu telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi terhadap kinerja untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan standar dan harapan yang ditetapkan.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2026 dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan 1 tahun 2026, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik sebesar **100,40%** dengan kriteria **Istimewa**, nilai ini diperoleh dari rata-rata nilai capaian masing-masing indikator kinerja. Namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya diukur pada akhir tahun. Adapun capaian indikator kinerja utama Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang diuraikan berdasarkan sasaran kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan  
Triwulan 1 Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW 1	Satuan	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW 1 (%)	Capaian Terhadap Target Tahunan
1.	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99.4	99.4	Persentase	100	100.60	100.60
		Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	83.75	82.35	Persentase	82.51	100,19	98.52

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW 1	Satuan	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW 1 (%)	Capaian Terhadap Target Tahunan
		Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium						
2.	Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	91.5		Persentase			Perhitungan capaian akhir tahun
3.	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4.86		Nilai			Perhitungan capaian akhir tahun
4.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	77.1		Nilai			Perhitungan capaian akhir tahun
		Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	75		Nilai			Perhitungan capaian akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	5		Nilai			Perhitungan capaian akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	2.05		Nilai			Perhitungan capaian akhir tahun
<b>Total Capaian PK</b>							<b>200.79</b>	
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik</b>							<b>100.40</b>	
<b>Predikat NKO Periodik</b>							<b>Istimewa</b>	

## ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis Akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dijabarkan sebagai berikut:

### Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sasaran kegiatan "Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" merupakan bagian integral dari upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui

jaminan mutu pengujian laboratorium. Laboratorium yang kompeten dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional menjadi landasan utama dalam menjamin validitas hasil pengujian obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Peningkatan kemampuan laboratorium diarahkan pada pemenuhan dan pemeliharaan akreditasi SNI ISO/IEC 17025 serta pemenuhan persyaratan teknis yang meliputi kecakapan personel, validasi metode, kalibrasi alat, dan pengendalian mutu internal serta eksternal. Melalui strategi ini, BPOM menargetkan peningkatan jumlah dan cakupan laboratorium yang terstandar, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kapasitas sumber daya manusia.

Keberhasilan sasaran ini akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap hasil pengujian laboratorium, memperkuat sistem pengawasan mutu produk, serta mendukung efektivitas pengambilan keputusan berbasis data ilmiah. Dengan demikian, laboratorium BPOM yang sesuai standar tidak hanya menjadi pusat uji yang andal, tetapi juga pilar utama dalam mendukung ketahanan sistem pengawasan obat dan makanan secara nasional. Sasaran kegiatan menguatnya laboratorium pengawasan obat dan makanan adalah tujuan utama yang ditetapkan oleh sebuah organisasi atau badan pengawas obat dan makanan untuk memastikan laboratorium yang bertanggung jawab atas pengujian dan pengawasan obat serta makanan beroperasi secara efektif dan efisien. Sasaran kegiatan ini untuk Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan terdapat 2 indikator kinerja utama: (1) Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dan (2) Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar.

Dengan mencapai sasaran-sasaran ini, laboratorium pengawasan obat dan makanan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di pasar aman dan berkualitas tinggi. Nilai pencapaian sasaran kegiatan “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan” pada Triwulan 1 Tahun 2026 adalah **100.40%** dengan kategori **Sangat Baik** seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Laboratorium BPOM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Target TW 1	Satuan	Realisasi	Capaian thd Target TW 1 (%)	Capaian thd Target Tahunan (%)
1.	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99,4	99,4	Persentase	100	100,60	100,60

Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,75	82,35	Persentase	82,51	100,19	98,52
Capaian Sasaran Kegiatan						100,40	99,56

### **IKU 1. Persentase Sampel Khusus/Kasus yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar**

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pengujian Khusus adalah pengujian Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional, yang merupakan tugas dan fungsi dari Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM).

Sampel obat dan makanan yang di terima oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan adalah sampel khusus/kasus/uji rujuk/konfirmasi/sampel dari pihak ketiga dalam rangka pengawasan pre-market dan post-market. Sampel yang diterima tersebut adalah:

- Sampel yang berasal dari Direktorat Pengawasan karena adanya dugaan pelanggaran di lingkup nasional dan internasional, sampel vaksin impor, pendeteksian kandungan materi biologi/kimia/fisik jenis baru (yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya).
- Sampel yang berasal dari Deputi IV Bidang Penindakan dalam rangka investigasi/intelijen dan pembuktian tindak pidana/penyidikan dalam lingkup nasional dan internasional.
- Sampel yang belum mampu diuji oleh UPT BPOM dalam rangka khusus/kasus/ investigasi dalam rangka pengawasan.
- Sampel pihak ketiga dalam rangka uji khusus/kasus/ investigasi.
- Pengujian dalam rangka pengkajian Obat dan Makanan.

Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu menjadi parameter untuk dapat menilai peningkatan pelayanan pengujian yang dilakukan BPKOM.

Penyelesaian pengujian dikatakan tepat waktu dan sesuai standar jika memenuhi timeline pengujian sesuai Standar Pelayanan Publik BPOM atau sesuai kesepakatan resmi/MoU. Acuan standar dalam pengujian merupakan acuan/kompensial resmi seperti Farmakope

Indonesia atau farmakope internasional lainnya atau metode yang telah tervalidasi/terverifikasi. Timeline pengujian adalah waktu yang dihitung mulai dari sampel diterima oleh laboratorium, diuji dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Uji. Timeline pembuatan sertifikat adalah waktu yang dihitung dari mulai Laporan hasil Uji diterima sampai dengan terbitnya sertifikat.

### Cara Perhitungan dan Formula

Persentase Penyelesaian Pengujian Kimia dan Biologi Sampel kasus/Khusus tepat waktu dan sesuai standar di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan selama tahun berjalan = Jumlah sampel yang memenuhi timeline pada tahun berjalan dibagi Total sampel Obat dan Makanan yang diuji di tahun berjalan dikali 100%

### 1. Capaian Realisasi IKU 1 Persentase Sampel Khusus/Kasus yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Triwulan 1 Tahun 2026

Tabel 3.3 Capaian Realisasi Kinerja IKU 1 Persentase Sampel Khusus/Kasus yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar pada Triwulan 1 Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99,40	100	100,60

Dari data di atas dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti realisasi triwulan 1 Tahun 2026 sebesar 100% telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 99,40%, sehingga nilai capaian terhadap target yang ditetapkan adalah 100,60% dengan kategori sangat baik.

Pada tahun 2026, BPKOM menargetkan Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah 99,40% terhadap jumlah sampel yang masuk/diterima dari semua komoditi (Obat, OTSK, Kosmetik, Pangan). Berikut hasil jumlah sampel pengujian BPKOM sampai dengan akhir triwulan 1 tahun 2026:

- Total Jumlah sampel yang masuk sampai dengan bulan Maret = 68 sampel
- Jumlah sampel yang sesuai timeline sampai dengan Maret = 47 sampel
- jumlah sampel yang diuji = 47 sampel
- Realisasi % sampel yang ditindaklanjuti sesuai timeline =  $(47/47) \times 100 = 100\%$
- Capaian % sampel yang ditindaklanjuti sesuai timeline:

$$= \text{Realisasi TW 1} / \text{Target TW 1} \times 100\%$$

$$= 100 / 99,40 \times 100\%$$

= 100,60 %

## 2. Perbandingan Capaian Realisasi IKU 1 pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Realisasi Triwulan 4 Tahun 2025


Terdapat kenaikan capaian kinerja IKU 1 “Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar” pada triwulan 1 Tahun 2026 yaitu 100% dibandingkan Triwulan 4 Tahun 2025 dengan capaian 99,30%.

Tabel 3.4 Capaian Realisasi Kinerja IKU 1 pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Triwulan 4 Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi TW 4 2025	Realisasi TW 1 2026	Capaian Terhadap Realisasi TW 4 (%)
1.	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99.30	100	100.70

## 3. Capaian Realisasi IKU 1 pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026

Tabel 3.5 Capaian Realisasi IKU 1 Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Satuan	Realisasi TW 1 2025	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99,40	Persentase	100	100,60	 Tercapai/ Melampaui

Capaian realisasi indikator kinerja “Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar” Triwulan 1 Tahun 2026 jika dibandingkan dengan target Renstra akhir tahun 2026 diperoleh capaian 100,60%. Dalam hal ini Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan telah melakukan pengujian sampel kasus/khusus dengan memenuhi standar dan sesuai timeline yang ditetapkan dengan kriteria Tercapai/Melampaui.

## 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Penyebab Keberhasilan Kinerja Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar Triwulan 1 Tahun 2026 memiliki persentase realisasi sebesar 100%

dengan persentase capaian IKU 1 sebesar 100,40%. Pada Tahun 2026 capaian persentase realisasi adalah memenuhi ekspektasi dengan kategori sangat baik, yang menunjukkan indikator tersebut tercapai melebihi target terhadap target Triwulan 1. Hal ini disebabkan komitmen BPKOM dalam menyelesaikan pengujian tepat waktu meskipun terdapat antrian sampel yang tinggi, dengan adanya kerjasama dan manajemen waktu yang baik, SDM penguji yang kompeten, kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengujian, dan monitoring evaluasi yang baik dalam mengawal tindak lanjut sampel yang tepat waktu.

Tabel 3.6 Matriks Rekomendasi Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	Tidak ada kendala	-	-	-	Y	BPKOM/ OPR/02	Laboratorium BPKOM tidak dapat memenuhi target Pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium sesuai SKL Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Peralatan di BPKOM tidak memenuhi standar peralatan laboratorium sesuai SKL BPOM

#### 5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya Perbaikan (Rekomendasi) Capaian indikator “Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar” memenuhi ekspektasi. Namun dalam rangka mempertahankan keberhasilan pencapaian indikator tersebut dilakukan dengan:

- a. Kompetensi personel penguji terus ditingkatkan.
- b. Dukungan pengembangan metode uji yang sudah tervalidasi/terverifikasi khususnya untuk sampel kasus obat dan makanan, sehingga dapat mempersingkat timeline pengujian.

- c. Mengusahakan pengembangan metode uji menggunakan instrumen teknologi tinggi yang mampu menguji dengan cepat dan valid.
- d. Upaya peningkatan yang berkelanjutan dalam monitoring dan evaluasi capaian indikator sehingga dapat segera melakukan tindak lanjut jika ada kendala pengujian.

**IKU 2. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

Pada Triwulan 1 Tahun 2026 Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah berupa nilai yang terdiri atas 4 komponen meliputi:

- a. Pemenuhan standar ruang lingkup pengujian;
- b. Pemenuhan standar peralatan laboratorium;
- c. Pemenuhan standar kompetensi laboratorium; dan
- d. Pemenuhan standar metode analisis yang tervalidasi/verifikasi

**1. Capaian Realisasi IKU 2 Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan 1 Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Triwulan 1 Tahun 2026**

Tabel 3.7 Capaian Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPKOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82,35	82,51	100,19

Perhitungan Nilai pemenuhan SKL BPKOM = (50 % x Nilai pemenuhan SRL) + (20% x Nilai pemenuhan standar peralatan) + (20% x nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium) + (10% x nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi)

Dimana komponen hasil penilaiannya adalah sebagai berikut :

- 1. Persentase Pemenuhan SRL (%) = 97,16
- 2. Persentase Pemenuhan Peralatan (%) = 56,78
- 3. Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%) = 80
- 4. Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%) = 65,79

Dari data diatas maka Realisasi Nilai pemenuhan SKL BPKOM = 82,51 %

$$\text{Capaian} = \frac{82,51\%}{82,35\%} \times 100\% = 100,19\%$$

Dari data di atas dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium realisasi sebesar 82,51 % telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 82,35%, hal ini disebabkan terdapatnya peningkatan/penambahan jumlah ruang lingkup pengujian dan jumlah MA yang terverifikasi/validasi dari yang direncanakan.

## 2. Perbandingan Capaian Realisasi IKU 2 pada Triwulan 1 Tahun 2025 Dibandingkan dengan Realisasi Triwulan 4 Tahun 2025

Terjadi penurunan capaian pada Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian target metode analisis (MA) pada Tahun 2026. Jika pada periode 2025–2029 target MA ditetapkan sebanyak 61 metode, maka pada periode 2026–2029 mengalami peningkatan menjadi 76 metode. Penambahan jumlah target tersebut berdampak pada meningkatnya standar pemenuhan yang harus dicapai, sehingga secara persentase realisasi pada awal tahun 2026 tampak menurun.

Meskipun demikian, capaian terhadap realisasi Triwulan 4 Tahun 2025 tercatat sebesar 98,76%, yang menunjukkan bahwa kinerja masih berada dalam kategori stabil dan relatif sebanding dengan periode sebelumnya. Penurunan yang terjadi lebih mencerminkan adanya peningkatan target dan standar yang harus dipenuhi, bukan penurunan kinerja secara substantif.


Tabel 3.8 Capaian Realisasi Kinerja IKU 1 pada Triwulan 1 Tahun 2026

Dibandingkan dengan Triwulan 4 Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi TW 4 2025	Realisasi TW 1 2026	Capaian Terhadap Realisasi TW 4 (%)
1.	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,55	82,51	98,76

### 3. Capaian Realisasi IKU 2 Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Target Akhir Tahun 2026

Tabel 3.9 Capaian Realisasi IKU 1 Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Satuan	Realisasi TW 1 2026	Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya Laboratorium B POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,75	Persentase	82,51	98,52%	 Akan Tercapai

Capaian Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 98,52%. Capaian realisasi indikator kinerja triwulan 1 Tahun 2026 masuk kategori akan tercapai.

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Karena banyaknya sampel khusus / kasus / uji rujuk / konfirmasi / sampel dari pihak ketiga dalam rangka pengawasan pre-market dan post-market yang masuk di uji dengan parameter uji beragam dan baru sehingga menyebabkan penambahan ruang lingkup pengujian di BPKOM dan sekaligus dilakukan verifikasi/validasi terhadap metode analisisnya.

Untuk meningkatkan keberhasilan kinerja ini diupayakan tersedia anggaran yang mencukupi untuk kebutuhan dalam peningkatan kompetensi, pemenuhan ruang lingkup pengujian, pemenuhan peralatan serta kebutuhan reagen/pereaksi dalam rangka verifikasi Metode Analisis.

Tabel 3.10 Matriks Rekomendasi Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan	Tidak ada kendala	-	-	-	Y	BPKOM/SDM/01	Laboratorium BPKOM tidak dapat memenuhi target Pemenuhan Kompetensi

	Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium							Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan  Masih terdapat kompetensi Laboratorium yang belum terpenuhi oleh Penguji
--	---	--	--	--	--	--	--	---

### 5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terus dilakukan BPKOM dalam pemenuhan indikator kinerja utama ini “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” antara lain melalui: Reviu standar ruang lingkup, standar peralatan, standar kompetensi laboratorium, standar MA terverifikasi/validasi disesuaikan dengan kasus yang muncul. Peningkatan cakupan ruang lingkup pengujian sesuai tantangan pengawasan Peningkatan kompetensi SDM Penguji sesuai dengan perkembangan teknologi produksi Obat dan Makanan dan isu aktual Obat dan makanan.

#### Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan 2, "Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar" merupakan bagian penting dari upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui jaminan mutu pengujian laboratorium.

Pelayanan pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik merupakan salah satu tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Maka berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025 tersebut, BPOM membentuk Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok salah satunya adalah Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM).

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.

Produk Tembakau meliputi: rokok; cerutu; rokok daun; tembakau iris; tembakau padat dan cair; dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Keberhasilan sasaran ini akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap hasil pengujian laboratorium, memperkuat sistem pengawasan mutu produk, serta mendukung efektivitas pengambilan keputusan berbasis data ilmiah.

Dengan mencapai sasaran ini, laboratorium pengawasan obat dan makanan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produk tembakau dan/atau Elektronik yang beredar di pasar aman dan berkualitas. Nilai pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar” dihitung pada akhir tahun sehingga tidak ada target maupun realisasi pada Triwulan 1 tahun 2026.

### **IKU 3. Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar**

Pengujian produk tembakau dan/atau Elektronik adalah pengujian sampel sediaan rokok yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan, kajian serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional.

Pengujian sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang dilaksanakan oleh BPKOM merupakan sampel rujukan yang berasal UPT/Balai di lingkungan Badan POM sesuai dengan pedoman sampling tahun berjalan dari kedeputian I di bawah Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Penyelesaian pengujian dikatakan tepat waktu dan sesuai standar jika memenuhi timeline pengujian sesuai Standar Pelayanan Publik BPOM atau sesuai kesepakatan resmi/MoU.

Acuan standar dalam pengujian merupakan acuan/kompensial resmi seperti Farmakope Indonesia atau farmakope internasional lainnya atau metode yang telah tervalidasi/terverifikasi. Timeline pengujian adalah waktu yang dihitung mulai dari sampel diterima oleh laboratorium, diuji dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Uji. Timeline pembuatan sertifikat adalah waktu yang dihitung dari mulai Laporan hasil Uji diterima sampai dengan terbitnya sertifikat

### Cara Perhitungan dan Formula

Persentase Penyelesaian Pengujian Sampel produk tembakau dan/atau elektronik tepat waktu dan sesuai standar di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan selama tahun berjalan = Jumlah sampel yang memenuhi timeline pada tahun berjalan dibagi Total sampel Obat dan Makanan yang diuji di tahun berjalan dikali 100%.

### 1. Capaian Realisasi Kinerja IKU 3 Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Triwulan 1 Tahun 2026 yang Dibandingkan dengan Target Triwulan 1 Tahun 2026

Tabel 3.11 Capaian Realisasi Kinerja IKU 3 Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar pada Triwulan 1 Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	N/A	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun

Berdasarkan tabel tersebut, indikator kinerja terkait persentase pengujian produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar belum dapat dihitung pada Triwulan 1 tahun 2026. Hal ini disebabkan karena pengukuran capaian indikator dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026, sehingga nilai target, realisasi, dan capaian persentase baru akan tersedia setelah seluruh data terkumpul dan diverifikasi.

## 2. Perbandingan Capaian realisasi IKU 3 pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Realisasi Triwulan 4 Tahun 2025

Tabel 3.12 Capaian Realisasi Kinerja IKU 3 pada Triwulan 1 Tahun 2026  
Dibandingkan dengan Triwulan 4 Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi TW 4 2025	Realisasi TW 1 2026	Capaian Terhadap Realisasi TW 4 (%)
1.	Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	109,89	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Realisasi indikator persentase pengujian produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar pada Triwulan 4 Tahun 2025 tercatat sebesar 109,89%. Sementara itu, realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2026 belum tersedia, sehingga capaian terhadap realisasi Triwulan 4 Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena pengukuran capaian indikator untuk Tahun 2026 dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun.

## 3. Capaian Realisasi IKU 3 pada Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Renstra Akhir Tahun 2029

Tabel 3.13 Capaian Realisasi IKU 3 Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Renstra akhir Tahun 2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Satuan	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	91,5	Persentase	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Target indikator persentase pengujian produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 91,5%. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi yang dapat dilaporkan, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Hal ini disebabkan karena perhitungan capaian indikator dilakukan pada akhir tahun. Oleh karena itu, nilai capaian dan kriteria penilaian akan disajikan pada akhir periode pelaporan.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2026.

Tabel 3.14 Matriks Rekomendasi Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	Tidak ada kendala	-	-	-	T		

#### 5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan maupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang indikator “Persentase produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar” perlu dilakukan upaya perbaikan untuk memenuhi ekspektasi. Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut tersebut antara lain:

- a. Perlu adanya penambahan APD yang disesuaikan dengan jumlah pengujian dan perbaikan ruangan laboratorium sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik.
- b. Perlu adanya perbaikan channel instrumen sehingga pengujian rokok lebih optimal.

Namun dalam rangka mempertahankan keberhasilan pencapaian indikator tersebut dilakukan dengan:

1. Peningkatan kompetensi personel pengujian.  
Workshop/Pelatihan Staf Pengujian untuk mengembangkan kompetensi pengujian sehingga pengujian teredukasi dengan baik mengenai pengetahuan, prosedur dan keterampilan yang memadai.
2. Dukungan pengembangan metode uji yang sudah tervalidasi/terverifikasi.
3. Dukungan pemeliharaan peralatan, perencanaan pengadaan reagen/suku cadang.
4. Upaya peningkatan yang berkelanjutan dalam monitoring dan evaluasi capaian indikator sehingga dapat segera melakukan tindak lanjut jika ada kendala pengujian.

5. Konsultasi Permasalahan dan Kendala Pengujian kepada narasumber yang kompeten agar hasil pengujian yang diperoleh akurat dan terpercaya.
6. Jejaring Laboratorium yang membuka peluang untuk berkolaborasi dalam hal pengetahuan dan sumber daya.

### **Sasaran Kegiatan 3 : Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang Prima**

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) berperan strategis dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Salah satu potensi kekuatan utamanya terletak pada kualitas layanan publik yang optimal, yang menjadikannya institusi terpercaya dan efisien dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pelaku industri.

Dengan sistem layanan berbasis teknologi dan proses kerja yang terstandar, BPKOM mampu memberikan hasil pengujian yang cepat dan akurat. Efisiensi ini menjadi nilai tambah penting dalam mendukung kebutuhan industri dan masyarakat yang memerlukan kepastian dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas. Kualitas layanan publik yang optimal tercermin dari transparansi proses pengujian dan akuntabilitas hasil yang diberikan. Setiap tahapan layanan didokumentasikan secara rinci, sehingga hasil pengujian dapat diverifikasi dan dipercaya oleh berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen.

Laboratorium didukung oleh fasilitas yang modern dan tenaga ahli yang kompeten, BPKOM mampu menghadirkan layanan yang memenuhi standar internasional. Hal ini memastikan bahwa setiap produk yang diuji memenuhi persyaratan ketat, baik di pasar domestik maupun internasional.

Kualitas layanan yang optimal menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri obat dan makanan yang berdaya saing tinggi. Dengan potensi dan kekuatan ini, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan terus berupaya memberikan layanan publik yang profesional, efisien, dan terpercaya. Kualitas pelayanan yang optimal menjadi landasan penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang tangguh demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#### **Cara Perhitungan dan Formula**

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Dengan mencapai sasaran ini, laboratorium pengawasan obat dan makanan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa pelayanan publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan memenuhi standar pelayanan yang prima. Nilai pencapaian sasaran kegiatan “Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan” dihitung pada akhir tahun sehingga tidak ada target maupun realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2026.

#### **IKU 4. Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan**

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (24%)
2. Profesionalitas SDM (25%)
3. Sarana Prasarana (18%)
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%)
6. Inovasi (12%)

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

#### **Cara Perhitungan dan Formula**

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

## 1. Capaian Realisasi Kinerja IKU 4 Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Target Triwulan 1 Tahun 2026

Tabel 3.15 Capaian Realisasi Kinerja IKU 4 Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Triwulan 1 Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)
1.	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat Dan Makanan	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	N/A	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun

Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tidak memiliki target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026. Hal ini disebabkan karena pengukuran capaian indikator dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026, sehingga nilai target, realisasi, dan capaian persentase baru akan tersedia pada akhir tahun 2026. Namun sudah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tersebut diantaranya: melakukan reviu atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan, melakukan survey kepuasan masyarakat, dan mengadakan kegiatan Forum Konsultasi Publik.

## 2. Perbandingan Capaian Realisasi IKU 4 pada Tahun 2025 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan 4 Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi TW 4 2025	Realisasi TW 1 2026	Capaian Terhadap Realisasi TW 4 (%)
1.	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat Dan Makanan	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,85	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2025 tercatat sebesar 4,85 dimana Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan telah memenuhi standar Pelayanan Prima. Sementara itu, realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2026 belum tersedia, sehingga capaian terhadap realisasi Triwulan 4 Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena pengukuran Indeks Pelayanan Publik Tahun 2026 dilaksanakan pada akhir tahun.

### 3. Capaian Realisasi IKU 4 pada Tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra Akhir Tahun 2029

Tabel 3.17 Capaian Realisasi IKU 4 Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Target Akhir Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Satuan	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)	Kriteria
1.	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat Dan Makanan	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,86	Nilai	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Target indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 4.86. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi yang dapat dilaporkan, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Hal ini disebabkan karena perhitungan capaian indikator dilakukan pada akhir tahun. Oleh karena itu, nilai capaian dan kriteria penilaian akan disajikan pada akhir periode pelaporan.

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir Tahun 2026.

Tabel 3.18 Matriks Rekomendasi Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Tidak ada kendala	-	-	-	Y	BPKOM/STR/01	Indeks pelayanan publik BPKOM tidak meningkat sesuai target yang ditetapkan  Data dukung aspek Pelayanan Publik belum dapat memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditetapkann

### 5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Evaluasi pada Indikator Pelayan Pengujian antara lain:

1. BPKOM mengusulkan agar kelompok rentan tidak dimasukkan dalam pelayanan jasa pengujian, karena kesulitan mencari responden untuk mengisi survey kelompok rentan.
2. Responden pengisi survey disesuaikan dengan pelanggan yang menggunakan jasa BPKOM
3. Pemeliharaan subsite INFALABS agar dapat berjalan optimal sebagai salah satu sarana pelayanan digital BPKOM.
4. Meningkatkan kompetensi dan perilaku petugas layanan.
5. Meningkatkan sistem informasi Pelayanan Publik.
6. Melayani dan menindaklanjuti konsultasi dan pengaduan.
7. Pengembangan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk pelayanan di BPKOM.

#### **Sasaran Kegiatan 4 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unnit Organisasi yang Optimal**

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang menjadi tujuan reformasi birokrasi diwujudkan dengan pelaksanaan tugas BPKOM secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan partisipatif (keterlibatan masyarakat). Untuk itu diperlukan penataan organisasi yang menekankan pada penguatan kelembagaan dan tata hubungan kerja (proses bisnis), baik hubungan dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan serta hubungan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Penataan organisasi bertujuan untuk membangun organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKOM. Pelaksanaan tugas yang disertai dengan sistem pengendalian intern yang optimal akan memastikan pencapaian tujuan BPKOM sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada sasaran kegiatan Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal di BPKOM terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu (1) Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, (2) Nilai AKIP Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, (3) Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dan (4) Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan

Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di BPKOM” dihitung pada akhir tahun sehingga tidak ada target maupun realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2026.

## **IKU 5. Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan**

Sesuai amanah PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

BPKOM terus berupaya untuk berkomitmen mengimplementasikan nilai-nilai RB pada enam area perubahan dalam membangun Zona Integritas untuk menciptakan birokrasi bermental melayani yang berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik BPKOM meningkat.

### **Cara Perhitungan dan Formula**

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu (1) komponen Pengungkit 60 dan (2) komponen Hasil 40.

Tabel 3.19 Cara Perhitungan Nilai Pembangunan ZI

No.	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1.	Manajemen Perubahan	8 %
2.	Penataan Tatalaksana	7 %
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10 %
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5.	Penguatan Pengawasan	15 %
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

No.	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,50 %
2.	Pelayanan Publik yang prima	50,17 %

### 1. Capaian Realisasi Kinerja IKU 5 Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.20 Capaian Realisasi Kinerja IKU 5 Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Triwulan 1 Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	N/A	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun

Indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tidak memiliki target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026. Hal ini disebabkan karena pengukuran capaian indikator dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026, sehingga nilai target, realisasi, dan capaian persentase baru akan tersedia pada akhir Tahun 2026. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tersebut diantaranya melengkapi data dukung LKE yang akan direviu oleh Inspektorat untuk dilakukan penilaian.

## 2. Perbandingan Capaian Realisasi IKU 5 pada Tahun 2025 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Triwulan 4 Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi TW 4 2025	Realisasi TW 1 2026	Capaian Terhadap Realisasi TW 4 (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	77,02	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Realisasi indikator Nilai Pembangunan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebesar 77,02. Sementara itu, realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 belum tersedia, sehingga capaian terhadap realisasi Triwulan IV Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena pengukuran Nilai Pembangunan ZI Tahun 2026 dilaksanakan pada akhir tahun.

## 3. Capaian Realisasi IKU 5 pada Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Renstra Akhir Tahun 2029

Tabel 3.22 Capaian Realisasi IKU 5 Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Target Akhir Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Satuan	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	77,1	Nilai	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Target indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 77,1. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi yang dapat dilaporkan, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Hal ini disebabkan karena perhitungan capaian indikator dilakukan pada akhir tahun. Oleh karena itu, nilai capaian dan kriteria penilaian akan disajikan pada akhir periode pelaporan.

## 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2026.

Tabel 3.23 Matriks Rekomendasi Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Nilai Pembangun an ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Tidak ada hambatan dan kendala	-	-	-	Y	BPKOM /STR/01 -05	Data dukung LKE/ZI yang disiapkan belum dapat memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditetapkan

#### 5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a. Pembentukan Tim Pokja ZI meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tata Laksana, SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Pelayanan Publik, dan Tim AOC. Masing-masing tim memiliki tugas spesifik dalam pembangunan WBK/WBBM.
- b. Forum Komunikasi Publik BPKOM dengan menghadirkan komunikasi dua arah dengan masyarakat pengguna layanan serta mendorong keterbukaan informasi dan memperkuat dimensi pelayanan prima.
- c. Kegiatan Pelatihan Internal (secara daring), dengan meningkatkan kapasitas pegawai dalam penerapan nilai-nilai integritas, pelayanan, dan akuntabilitas. Menjadi solusi atas keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan pelatihan tatap muka.
- d. Penguatan Pelayanan Publik dengan cara melakukan perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana layanan publik serta penyesuaian target pelayanan publik yang realistis namun menantang, berdasarkan capaian tahun sebelumnya.
- e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan. Memberikan gambaran menyeluruh tentang realisasi kegiatan dan hambatan secara berkala. Menjadi acuan penting dalam perbaikan tata kelola dan dokumentasi. Menunjukkan akuntabilitas dan keterlacakan terhadap implementasi reformasi birokrasi

#### IKU 6. Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

BPKOM sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM turut berperan aktif dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari upaya penguatan AKIP. BPKOM secara konsisten melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara terstruktur dan berkelanjutan, guna memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Melalui penerapan SAKIP yang efektif, BPKOM diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memberikan layanan pengujian yang berkualitas kepada masyarakat.

### **Cara Perhitungan dan Formula**

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Tabel 3.24 Bobot Penilaian AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	<b>Nilai Evaluasi</b>	<b>100</b>

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

Tabel 3.25 Predikat Nilai AKIP

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi ( <i>Reform</i> ).
2.	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
6.	C	>30-50	Kurang Sistem dan tata letak dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tata letak dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

### 1. Capaian Realisasi IKU 6 Nilai AKIP pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Triwulan 1 Tahun 2026

Tabel 3.26 Capaian Realisasi Kinerja IKU 6 Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Triwulan 1 Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	N/A	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun

Indikator Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tidak memiliki target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026. Hal ini disebabkan karena pengukuran capaian indikator dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026, sehingga nilai target, realisasi, dan capaian persentase baru akan tersedia pada akhir tahun 2026.

### 2. Perbandingan Capaian Realisasi IKU 6 pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Realisasi Triwulan 4 Tahun 2025

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Triwulan 4 Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi TW 4 2025	Realisasi TW 1 2026	Capaian Terhadap Realisasi TW 4 (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Indikator Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Triwulan IV Tahun 2025 belum memiliki data realisasi yang dapat disajikan, mengingat pada tahun tersebut belum ditetapkan indikator penilaian AKIP BPKOM. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator juga belum dapat dihitung karena pengukuran dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun. Dengan demikian, nilai AKIP pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2025, baik karena keterbatasan data pada tahun sebelumnya maupun mekanisme pengukuran yang bersifat tahunan.

### 3. Capaian Realisasi IKU 6 pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026

Tabel 3.28 Capaian Realisasi IKU 6 Triwulan 1 Tahun 2026 dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Satuan	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	75	Nilai	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Target indikator Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 75. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi yang dapat dilaporkan, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Hal ini disebabkan karena perhitungan capaian indikator dilakukan pada akhir tahun. Oleh karena itu, nilai capaian dan kriteria penilaian akan disajikan pada akhir tahun 2026.

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2026.

Tabel 3.29 Matriks Rekomendasi Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Tidak ada hambatan dan kendala	-	-	-	T	-	-

## 5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Perlunya langkah-langkah dan penyusunan kegiatan yang akan dilakukan agar keberhasilan Nilai AKIP dapat terpenuhi yaitu:

1. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
2. Melaksanakan realisasi belanja sesuai dengan rencana penarikan dana.
3. Pelaporan dan evaluasi kinerja tepat waktu.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator dan output kegiatan pada setiap bulan.
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Plan of Action* yang telah ditetapkan.

## IKU 7. Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) UPT adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran UPT. NKA merupakan hasil penjumlahan dari Nilai Kinerja atas Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran.

Nilai Kinerja atas Perencanaan Anggaran atau Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian atas kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

### Cara Perhitungan dan Formula

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Tabel 3.30 Konversi kategori penilaian dalam PMK 62/2023

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

### 1. Capaian Realisasi Kinerja IKU 7 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 3.31 Capaian Realisasi IKU 7 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Triwulan 1 Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	N/A	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tidak memiliki target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026. Hal ini disebabkan karena pengukuran capaian indikator dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026, sehingga nilai target, realisasi, dan capaian persentase baru akan tersedia pada akhir tahun 2026. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tersebut diantaranya melengkapi data dukung LKE yang akan direviu oleh Inspektorat untuk dilakukan penilaian.

Nilai IKPA diperoleh secara langsung dari Aplikasi *My Integrated Treasury System* (<https://myinterest.kemenkeu.go.id/>).



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	03 Maret	175	063	691156	BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	32,07 20 6,41	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	83,02	0,00 25 0,00	0,00	61,41	100,00%	0,00	61,41

Gambar 3.1 Tangkapan Layar Nilai IKPA BPKOM Triwulan 1 Tahun 2026

Dari gambar diatas terlihat bahwa komponen penilaian IKPA BPKOM mendapatkan nilai 61,41 dengan kategori cukup dikarenakan nilai capaian output belum termasuk dalam perhitungan nilai IKPA. Tenggat waktu pengisian capaian output sampai dengan bulan Maret setelah tanggal pengumpulan Laporan Kinerja.

## 2. Perbandingan Capaian Realisasi IKU 7 pada Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Realisasi Triwulan 4 Tahun 2025

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Triwulan 4 Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi TW 4 2025	Realisasi TW 1 2026	Capaian Terhadap Realisasi TW 4 (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	5	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2025 tercatat sebesar 5. Sementara itu, realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2026 belum tersedia, sehingga capaian terhadap realisasi Triwulan 4 Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena pengukuran Nilai Pembangunan ZI Tahun 2026 dilaksanakan pada akhir tahun.

## 3. Capaian Realisasi IKU 7 Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026

Tabel 3.33 Capaian Realisasi IKU 5 Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Satuan	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	5	Nilai	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Target indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 5. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi yang dapat dilaporkan, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Hal ini disebabkan karena perhitungan capaian indikator dilakukan pada akhir tahun. Oleh karena itu, nilai capaian dan kriteria penilaian akan disajikan pada akhir periode pelaporan.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Nilai kinerja anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Penilaian IKPA tahun anggaran 2025 terdiri dari 3 aspek 8 indikator, meliputi:

- a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Hal III DIPA (15%)
- b. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran yaitu Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), dan Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA).
- c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yaitu Capaian Output (25%).

Penilaian EKA dihitung dari 4 variabel yaitu Penyerapan Anggaran, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, Capaian Rincian Output, dan Efisiensi.

Faktor penyebab tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut :

1. Revisi DIPA yang terukur dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Penyelesaian tagihan yang dilaksanakan tepat waktu maksimal 17 Hari Kerja
3. Pengelolaan UP/TUP dilakukan secara tepat waktu dan akurat
4. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara rutin agar capaian output dilaporkan tepat waktu dan akurat
5. Surat Perintah Membayar disampaikan tepat waktu sehingga tidak adanya Dispensasi Surat Perintah Membayar

Tabel 3.34 Matriks Rekomendasi Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat	Penyerapan Anggaran pada TW 1 kurang optimal	Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran	Mempercepat proses realisasi pengadaan barang	TW 4	Y	BPKOM /OPR/03	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD)

	dan Makanan			g dan jasa				
--	-------------	--	--	------------	--	--	--	--

### 5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Perlunya Langkah-langkah dan penyusunan kegiatan yang akan dilakukan agar keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran dapat terpenuhi yaitu:

1. Melaksanakan realisasi belanja sesuai dengan rencana penarikan dana.
2. Penyerapan Anggaran di setiap triwulan mencapai target yang ditentukan oleh kementerian keuangan.
3. Penyelesaian tagihan dilakukan tepat waktu.
4. Pengelolaan UP dan TUP dilaksanakan tepat waktu.
5. Pengelolaan SPM secara tepat waktu.
6. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui aplikasi SAKTI tepat waktu.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator dan output kegiatan pada setiap bulan.
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Plan of Action yang telah ditetapkan.

## IKU 7. Indeks Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP.

SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah

Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai

peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko.
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Keputusan Inspektur Utama Badan POM Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Terdapat 5 kategori tingkat maturitas, yaitu:

Tabel 3.35 Kategori Tingkat Maturitas

<b>Kategori Tingkat Maturitas</b>	<b>Karakteristik</b>
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis.
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Indeks Manajemen Risiko merupakan salah satu indikator kinerja strategis yang ditetapkan oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pada Tahun Anggaran

2025, Indeks Manajemen Risiko BPKOM ditargetkan mencapai skor 2 hingga akhir tahun sebagai wujud komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, pengendalian internal, dan mitigasi risiko di BPKOM.

### Cara Perhitungan dan Formula

Nilai Maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3.36 Klasifikasi Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama
- 16 merupakan jumlah karakteristik kunci penilaian

### 1. Capaian Realisasi IKU 8 Indeks Manajemen Resiko pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.37 Capaian Realisasi IKU 8 Indeks Manajemen Risiko pada Triwulan 1 Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	N/A	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun

Indikator Indikator Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tidak memiliki target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026. Hal ini disebabkan karena pengukuran capaian indikator dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026, sehingga nilai target, realisasi, dan capaian persentase baru akan tersedia pada akhir tahun 2026.

## 2. Perbandingan Capaian Realisasi IKU 8 pada Triwulan 1 Tahun 2026 dibandingkan dengan Realisasi Triwulan 4 Tahun 2025

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Triwulan 4 Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi TW 4 2025	Realisasi TW 1 2026	Capaian Terhadap Realisasi TW 4 (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	1,906	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Realisasi indikator Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebesar 1,906. Sementara itu, realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 belum tersedia, sehingga capaian terhadap realisasi Triwulan IV Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena pengukuran Nilai Pembangunan ZI Tahun 2026 dilaksanakan pada akhir tahun.

## 3. Capaian Realisasi IKU 8 Triwulan 1 Tahun 2026 Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026

Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Triwulan 1 Tahun 2026 dengan Target Akhir Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2026	Satuan	Realisasi TW 1 2026	Capaian (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	2,05	Nilai	N/A	Perhitungan capaian pada akhir tahun	N/A

Target indikator Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 2,05. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi yang dapat dilaporkan, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Hal ini disebabkan karena perhitungan capaian indikator dilakukan

pada akhir tahun. Oleh karena itu, nilai capaian dan kriteria penilaian akan disajikan pada akhir periode pelaporan.

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2026.

Tabel 3.40 Matriks Rekomendasi Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Manajemen Resiko	Tidak ada kendala	-	-	-	Y	BPKOM/STR/08	Belum semua ketua tim/ penanggung jawab kegiatan memahami cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko

#### 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang peningkatan nilai tingkat maturitas manajemen risiko, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan akan melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melaporkan manajemen risiko pada aplikasi SAPA APIP sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan pada petunjuk pelaksanaan manajemen risiko pada periode selanjutnya;
- b. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM;
- c. Melakukan penilaian risiko sesuai Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko BPOM serta melengkapi kertas kerja penentuan skor risiko sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak;
- d. Melakukan tinjauan kembali atas respon risiko dan tindakan mitigasi, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual;
- e. Mempertimbangkan isu internal dan eksternal dalam mengidentifikasi/reviu risiko;
- f. Melaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, melalui checklist pada aplikasi SAPA APIP maupun pelaporan secara formal;

- g. Melakukan identifikasi risiko atas seluruh program/kegiatan baru;
- h. Pimpinan unit kerja selaku pemilik risiko agar meningkatkan komitmen dan keterlibatan dalam proses pengelolaan manajemen risiko dan masukan/arahan tersebut agar didokumentasikan;
- i. Melakukan pengujian aktivitas pengendalian eksisting untuk risiko inheren dengan level risiko  $\geq 16$  dan mendokumentasikan kertas kerja hasil pengujian secara memadai.

### 3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tabel 3.41 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	1. Belum dapat dilakukannya pemeliharaan beberapa alat laboratorium dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.	Penambahan anggaran pemeliharaan alat laboratorium	Penambahan anggaran pemeliharaan alat laboratorium	Belum selesai	Sedang dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alat laboratorium	TW 3 2026	Y	BPKOM/OPR/02	Laboratorium BPKOM tidak dapat memenuhi target Pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium sesuai SKL Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Peralatan di BPKOM tidak memenuhi standar peralatan laboratorium sesuai SKL BPOM
2.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1. Pada TW IV ini kompetensi laboratorium untuk komoditi kosmetik dan Mikrobiologi pada aspek 2 masih bernilai nol karena belum ada sampel yang masuk untuk parameter uji yang dimaksud serta keterbatasan anggaran sehingga	Peningkatan kompetensi terhadap personel pengujian	1. Dalam rangka peningkatan kompetensi laboratorium kegiatan dilakukan dengan membeli sampel untuk menguji parameter yang dilakukan oleh 2 orang.	Belum selesai	Belum ada progres	TW 3 2026	Y	BPKOM/SDM/01	Laboratorium BPKOM tidak dapat memenuhi target Pemenuhan Kompetensi Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan  Masih terdapat kompetensi Laboratorium yang

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		belum bisa terpenuhi.		2. Personel untuk pemenuhan ruang lingkup pengujian.						belum terpenuhi oleh Penguji
3.	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	1. Keterbatasan APD untuk melindungi penguji rokok dan sirkulasi udara dalam laboratorium pengujian rokok yang belum memadai. 2. Instrumen smoking machine saat ini dalam kondisi kurang optimal karena hanya dapat digunakan 15 chanel dari 20 chanel sehingga waktu pengujian menjadi lebih lama.	Penambahan anggaran untuk pembelian APD dan perbaikan alat agar alat yang sudah ada dapat difungsikan dengan optimal	a. Perlu adanya penambahan APD yang d disesuaikan dengan jumlah penguji dan perbaikan ruangan laboratorium sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik. b. Perlu adanya perbaikan chanel instrumen sehingga pengujian rokok lebih optimal	Belum selesai	Belum ada progres	TW 4 2026	T	-	-
4	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Kesulitan dalam mencari responden untuk mengisi survey kelompok rentan (kelompok rentan tidak masuk dalam	Responden pengisi survey sesuai dengan pelanggan yang menggunakan jasa BPKOM	Responden pengisi survey sesuai dengan pelanggan yang menggunakan jasa BPKOM	Selesai	Sudah dilakukan pengisian survey sesuai dengan pelanggan yang	TW 4 2026	Y	BPKOM/ STR/01	Indeks pelayanan publik BPKOM tidak meningkat sesuai target yang ditetapkan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		pelayanan jasa pengujian)				menggunakan jasa BPKOM				Data dukung aspek Pelayanan Publik belum dapat memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditetapkan
5	Nilai Pembangu n ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Tidak ada hambatan dan kendala	-	-	-	-	-	Y	BPKOM/ STR/01- 05	Data dukung LKE/ZI yang disiapkan belum dapat memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditetapkan
6	Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Tidak ada hambatan dan kendala	-	-	-	-	-	T	-	-
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Tidak ada hambatan dan kendala	-	-	-	-	-	Y	BPKOM/ OPR/03	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD)
8	Indeks Manajemen Resiko	Masih perlu mencermati terkait risiko yang terdapat di BPKOM	Dukungan pimpinan unit dan pemangku risiko	Dukungan pimpinan unit dan pemangku risiko	Belum selesai	Mereviu terkait risiko yang terdapat di BPKOM	TW 3 2026	Y	BPKOM/ STR/08	Belum semua ketua tim/ penanggung jawab kegiatan memahami cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, didukung dengan anggaran. Penggunaan anggaran tersebut perlu dilakukan evaluasi dan analisis efisiensinya.

#### a. Analisis realisasi anggaran dilaksanakan per sasaran dan per program/kegiatan

Realisasi anggaran BPKOM pada triwulan 1 hingga 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp. 884.670.346 (Delapan ratus juta delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) atau 6,34% dari pagu yang dikelola Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sebesar Rp. 13.949.814.000

Berikut realisasi anggaran per indikator kinerja yang ada pada Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan:

Tabel 3.42 Realisasi Kinerja Indikator dibandingkan Realisasi Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan s/d Bulan Maret Tahun 2026

No	Indikator Kerja	Target	Realisasi	% Realisasi
IKU 1	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	1.372.403.000	3.696.300	0,27%
IKU 2	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6.793.373.000	43.359.000	0,64%
IKU 3	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	186.789.000	-	0,00%
IKU 4	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	91.509.000	3.385.057	3,70%
IKU 5	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	257.743.400	40.147.875	15,58%
IKU 6	Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	1.030.973.600	160.591.501	15,58%
IKU 7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4.138.300.000	633.490.613	15,31%
IKU 8	Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	78.723.000	-	0,00%
<b>Total</b>		<b>13.949.814.000</b>	<b>884.670.346</b>	<b>6,34%</b>

## b. Realisasi Anggaran per Sasaran

Tabel 3.43 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran kegiatan	Target Sasaran	Realisasi	% Realisasi
SK 1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8.165.776.000	47.055.300	0,58%
SK 2	Meningkatnya pengujian produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	186.789.000	-	0,00%
SK 3	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang Prima	91.509.000	3.385.057	3,70%
SK 4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	5.505.740.000	834.229.989	15,15%
<b>Total</b>		<b>13.949.814.000</b>	<b>884.670.346</b>	<b>6,34%</b>

## c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Untuk pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan. Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 3.44 Tingkat Efisiensi Kinerja

Tingkat Efisiensi	% Capaian	Keterangan
< 0	-	Tidak Efisien
0 – 0,2	100%	Efisien
0,21 – 0,4	95%	Efisien
0,41 – 0,6	92%	Efisien
0,61 – 0,8	90%	Efisien
0,81 – 1,0	88%	Efisien
1,01 – 1,2	86%	Tidak Efisien
1,21 – 1,4	84%	Tidak Efisien
1,41 – 1,6	80%	Tidak Efisien
1,61 – 1,8	78%	Tidak Efisien
> 1,81	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.45 Efisiensi Anggaran per Indikator Kinerja di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Triwulan 1 Tahun 2026

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target IK	Target Anggaran TW 1	Realisasi Anggaran TW 1	Target IKU TW 1	Realisasi IKU TW 1	% Capaian		IE	SE	TE	Kategori
								Anggaran (Input)	Kinerja (Output)				
SK 1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	1.372.403.000	3.760.000	3.696.300	99,40	100	98,31	100,60	1,02	1,00	0,02	EFISIEN
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6.793.373.000	44.000.000	43.359.000	82,35	82,51	98,54	100,19	1,02	1,00	0,02	EFISIEN
SK 2	Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai Standar	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai Standar	186.789.000	-	-	-	-	-	Perhitungan Akhir tahun	Perhitungan Akhir tahun	1,00	Perhitungan Akhir tahun	Dihitung Akhir tahun
SK 3	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	91.509.000	3.450.000	3.385.057	-	-	98,12	Perhitungan Akhir tahun	Perhitungan Akhir tahun	1,00	Perhitungan Akhir tahun	Dihitung Akhir tahun
SK 4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	257.743.400	41.000.000	40.147.875	-	-	97,92	Perhitungan Akhir tahun	Perhitungan Akhir tahun	1,00	Perhitungan Akhir tahun	Dihitung Akhir tahun
		Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	1.030.973.600	164.500.000	160.591.501	-	-	97,62	Perhitungan Akhir tahun	Perhitungan Akhir tahun	1,00	Perhitungan Akhir tahun	Dihitung Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4.138.300.000	648.677.366	633.490.613	-	-	97,66	Perhitungan Akhir tahun	Perhitungan Akhir tahun	1,00	Perhitungan Akhir tahun	Dihitung Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	78.723.000	-	-	-	-	-	Perhitungan Akhir tahun	Perhitungan Akhir tahun	1,00	Perhitungan Akhir tahun	Dihitung Akhir tahun
			<b>13.949.814.000</b>	<b>905.387.366</b>	<b>884.670.346</b>			<b>97,71</b>	<b>100,40</b>	<b>1,03</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>	<b>EFISIEN</b>

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim BPKOM Triwulan 1 Tahun 2026 menggambarkan capaian serta kendala dalam upaya dalam mencapai Sasaran Kegiatan BPKOM pada Triwulan 1 Tahun 2026, yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja BPKOM pada Triwulan 1 tahun 2026, sebagai berikut:

- a. BPKOM memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja, dengan hasil capaian 2 (dua) indikator kinerja memperoleh penilaian dengan kategori Sangat Baik, yaitu IKU Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar dan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; dan 6 (enam) indikator kinerja lainnya yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun.
- b. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik BPKOM triwulan 1 tahun 2026 adalah 100,40% dengan kategori Istimewa.
- c. Realisasi anggaran BPKOM hingga 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp. 884.670.346,- atau atau 6,34% dari pagu yang dikelola Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sebesar Rp. 13.949.814.000,-.
- d. Tingkat Efisiensi (TE) BPKOM pada Triwulan 1 tahun 2026 adalah 0,03 (capaian 100%) dengan kategori Efisien.

### 4.2 REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPKOM pada periode selanjutnya, khususnya untuk pencapaian target kinerja Tahun 2026 secara menyeluruh, disampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan kompetensi SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis dan manajerial, baik secara luring maupun daring, guna mendukung peningkatan kualitas hasil pengujian dan layanan.
2. Diperlukan upaya peningkatan sarana dan prasarana laboratorium, termasuk perluasan ruang lingkup pengujian serta pemenuhan standar mutu laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Perlu dilakukan pengelolaan anggaran secara lebih efektif dan efisien melalui perencanaan yang matang, prioritas kegiatan, serta peningkatan pengendalian terhadap realisasi anggaran.
4. Pengembangan inovasi layanan berbasis digital serta peningkatan kapasitas petugas layanan perlu terus didorong guna meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.
5. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pembangunan Zona Integritas, serta penerapan manajemen risiko perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala perlu diperkuat guna memastikan seluruh indikator kinerja dapat tercapai sesuai target akhir tahun.
7. Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKOM.

# LAMPIRAN I

## PERJANJIAN KINERJA BPKOM TAHUN 2026



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFI SOPHIAN

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MIMIN JIWO WINANTI

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama  
Kepala Balai Pengujian Khusus  
Obat dan Makanan



ALFI SOPHIAN

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Pengembangan  
Pengujian Obat dan Makanan



MIMIN JIWO WINANTI

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	02 - Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99.4 Persentase
		02 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83.75 Persentase
2.	03 - Meningkatnya pengujian Produk Tembakau dan/atau Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar	01 - Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	91.5 Persentase
3.	05 - Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4.86 Nilai
4.	08 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	77.1 Nilai
		02 - Nilai AKIP Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	75 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	2.05 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 13,949,814,000 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.4133 - Pengujian Obat dan Makanan	8,522,797,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	5,427,017,000

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama  
Kepala Balai Pengujian Khusus  
Obat dan Makanan



**ALFI SOPHIAN**

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Pengembangan  
Pengujian Obat dan Makanan



**MIMIN JIWO WINANTI**

# LAMPIRAN II

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BPKOM

### TAHUN 2026



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	02 - Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar			99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	1,372,403,000
		02 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	82.35	82.35	82.35	82.69	82.69	82.69	83.04	83.04	83.04	83.75	6,793,373,000
2.	03 - Meningkatnya pengujian Produk Tembakau dan/atau Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar	01 - Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar											91.5	186,789,000	
3.	05 - Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan											4.86	91,509,000	
4.	08 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.1	257,743,400
		02 - Nilai AKIP Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan												75	1,030,973,600
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian												5	4,138,300,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		Khusus Obat dan Makanan														
		04 - Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan												2.05		78,723,000
<b>Total</b>															<b>13,949,814,000</b>	

Jakarta, 26 February 2026

Kepala Balai Pengujian Obat dan Makanan



ALFI SOPHIAN

## LAMPIRAN III

### CAPAIAN RHPK BPKOM TRIWULAN 1 TAHUN 2026

Indikator	Satuan	Target	Target TW 1	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target Tw 1	Capaian thd Target tahunan	Kategori	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	nilai	99.4	99.4	-	-	100	100.60%	99.4%	-	Tidak ada hambatan dan kendala	
Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	persen	83.75	82.35	-	-	82.51	100.2%	98.5%	-	Tidak ada hambatan dan kendala	
Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektrik yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persen	91.5	-	-	-	-	-	-	Akhir tahun	Tidak ada hambatan dan kendala	
Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Nilai	4.86	-	-	-	-	-	-	Akhir tahun	Tidak ada hambatan dan kendala	
Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Nilai	77.1	-	-	-	-	-	-	Akhir tahun	Tidak ada hambatan dan kendala	
Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Nilai	75	-	-	-	-	-	-	Akhir tahun	Tidak ada hambatan dan kendala	
Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Nilai	5	-	-	-	-	-	-	Akhir tahun	Tidak ada hambatan dan kendala	
Indeks Manajemen Resiko	Indeks	2.05	-	-	-	-	-	-	Akhir tahun	Tidak ada hambatan dan kendala	